

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Prosedur akuntansi pendapatan daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngada Tahun 2017 belum berjalan sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu peraturan permendagri No.64 tahun 2013 dan PP 71 tahun 2010. Hal ini ditunjukkan dalam prosedur akuntansi yang dimulai dari jurnal sampai laporan keuangan. Prosedur akuntansi Pendapatan daerah terdiri atas tiga unsur yaitu:

1. Pengakuan pendapatan.

Pihak Badan Keuangan Kabupaten Ngada mengakui semua pendapatan, jika timbulnya hak atas pendapatan atau timbulnya sumber daya yang masuk ke Badan Keuangan Kabupaten Ngada

2. Pengukuran pendapatan

Pihak Badan Keuangan kabupaten Ngada mengukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan.

3. Penyajian atau pelaporan

Penyajian prosedur akuntansi pendapatan daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngada Tahun 2017, belum sesuai dengan PERMENDAGRI dan PP 71 tahun 2010. Hal ini telah ditunjukkan dalam laporan keuangan yang yaitu jurnal yang masih berbasis kas,

4. Faktor Penghambat pencatatan laporan keuangan adalah sumber daya manusia, kurangnya tenaga kerja, sarana dan prasarana, jaringan internet.

6.2 Saran

Bagi kantor Badan Keuangan Kabupaten Ngada harus lebih memperhatikan dalam hal menyelesaikan prosedur akuntansi keuangan daerah:

1. Pengakuan akuntansi pendapatan

Pihak Badan Keuangan Kabupaten Ngada harus mengakui pendapatan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu PP 71 Tahun 2010 yaitu basis akrual.

2. Pelaporan akuntansi Pendapatan

Pihak Badan Keuangan Kabupaten Ngada harus lebih memperhatikan dalam menyelesaikan prosedur akuntansi sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan. Pihak Badan Keuangan Kabupaten Ngada harus mencatat semua penerimaan yang menjadi pendapatan daerah, termasuk dana bos agar tidak jadi perselisihan.

3. Pihak Badan Keuangan Kabupaten Ngada harus lebih memperhatikan dalam menyelesaikan prosedur akuntansi pendapatan daerah, misalnya dengan memperhatikan:

- a. Pihak Badan Keuangan Kabupaten Ngada harus memberi bimbingan atau pelatihan kepada karyawan agar dapat memahami prosedur akuntansi khususnya pada bagian pendapatan
- b. Untuk mempermudah penyelesaian laporan keuangan khususnya pada bagian pendapatan, pihak Badan Keuangan Kabupaten Ngada harus merekrut tenaga kerja akuntansi yang handal dalam mengelola keuangan daerah khususnya akuntansi pendapatan
- c. Pihak Badan Keuangan Kabupaten Ngada sebaiknya melengkapi sarana dan prasana, agar mempermudah dalam menyelesaikan laporan keuangan khusus pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian Indra. 2011. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta:Salemba Empat.
- Cicilia. 2015. Analisis Prosedur Penerimaan Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKD) Kabupaten Kepulauan Sitaro, Jurusan Akuntansi.
<http://kim.ung.ac.id/indeks.php/KIMFEB/article/download/2047/2026>
Dilihat pada tanggal 13 April 2019.
- Chartika . 2015. Analisis sistem dan prosedur penerimaan kas pendatan asli daerah (PAD) pada DPPKD Kabupaten Minahasa Utara, Jurusan Akuntansi.
<http://kim.ung.ac.id/indeks.php/KIMFEB/article/download/2047/2026>
Dilihat pada tanggal 13 April 2019.
- Erlina, Rambe dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri No.64 Tahun 2013*. Jakarta:Salemba Empat.
- Halim dan Kususf. 2014. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Intihanah. 2017. Evaluasi Sistem Penatausahaan Penerimaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daaerah (BPKAD) Kota Kendari.
<http://kim.ung.ac.id/indeks.php/KIMFEB/article/download/2047/2026>
Dilihat pada tanggal 13 April 2019.
- Mahsun, Sulistyowati dan Purwanurgha. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:BPFE.
- Peraturan Pemerintah dalam Negeri No.21 Tahun 2018 Tentang Pendapatan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Ratmono dan Sholihin. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Supriyadi, Suwanda dan Agung Manghayu. 2017. *Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian*. Jakarta: Alfabeta